BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis tindak pidana yang dilakukan Anak, pada prinsipnya sama dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pencurian, penganiayaan, dan lain-lain, atau melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal-Pasal peraturan hukum pidana khusus di luar KUHP, misalnya melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak tersebut berkonflik dengan hukum dan berhadapan dengan proses hukum.

Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang. Problematika ini juga sedang berlangsung di Indonesia. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Nandang Sambas mengemukakan bahwa:

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku¹.

---

¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.103.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya². Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Wagiyati Sutedjo: “Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari”³.

Penegakan hukum bagi Anak yang melakukan suatu tindak pidana ditangani dengan cara proses peradilan khusus, bukan proses peradilan seperti biasanya. Wagiyati Sutedjo sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa:

Proses penegakan hukum bagi Anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, maka berlaku ketentuan hukum khusus tentang Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327, yang diberlakukan sekitar 30 Juli 2014⁴.

Selanjutnya Abintoro Prakoso mengatakan bahwa:

---

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

³ Wagiyati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29.

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 23.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁵.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Undang-Undang ini memandang anak sebagai subjek yaitu subjek hukum yang wajib dilindungi. Sehingga Di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini berlaku prosedur peradilan tersendiri yang berbeda dengan peradilan yang bukan anak atau orang dewasa yang disebut dengan Peradilan Pidana Anak.⁷ Tujuan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Proses penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁸ Sehingga aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Serta kedudukan anak di dalam masyarakat yang masih membutuhkan suatu

---

⁵ *Ibid*

⁶ Andi Najemi, Kabib Nawawi, Lilik Purwastuti. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020, hlm. 441. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/10876/6575>

⁷ Emy Rosna Wati. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No.2, Oktober 2017, hlm. 282. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/1162/827>

⁸ M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa. "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 126. <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9572/6400>

perlindungan dapat di jadikan dasar untuk mencari solusi alternatif agar anak yang berkonflik dengan hukum terhindar dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif atau disebut juga *restorative justice*.

Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara.⁹ Pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak, selanjutnya dijelaskan oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, sebagai berikut:

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan “kesejahteraan anak” yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di-Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.¹⁰

---

⁹ Hafrida, Yulia Monita, Elisabeth Siregar, “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian (Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (Diversi) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol.V, No 3, September 2015, hlm. 202. <https://ojs.unm.ac.id/pubpend/article/download/1613/672>

¹⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Sri Rahayu, “Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com>, hlm.107.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Pasal 5) dan Diversi (Pasal 6-Pasal 15). Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa:

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pengertian keadilan restoratif dirumuskan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Pengertian Diversi dirumuskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Berdasarkan sifat yang khusus terhadap peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana, dengan ciri khas mengutamakan prinsip atau asas diversi dan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembedaan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan.

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dengan cara membujuk anak untuk melakukan persetujuan.

Kajian tentang tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan cara terlebih dahulu melakukan pembujukan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisisnya adalah ancaman hukuman terhadap tindak pidana ini cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Adapun ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat diketahui bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan, baik

dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini akan mengalami pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika pelakunya adalah anak, Pada prinsipnya peradilan anak lebih menekankan kepada pendekatan diversi, yaitu penyelesaian di luar proses peradilan dan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan bersifat pembalasan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulian, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, karena alasan independensi maka Hakim tidak terikat dengan besaran hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya Majelis Hakim dapat saja menghukum terhadap terdakwa lebih ringan, atau lebih berat atau sama dengan tuntutan Jaksa.

Tabel
Putusan Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Bulian
Tahun 2019 s/d 2021

No	Tahun	Putusan	Keterangan
1	2019	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (1 Tahun)
		4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (1 Bulan 10 Hari)
		2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu

			tertentu (2 Bulan)
		2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (4 Bulan)
		1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Tahap Kasasi
2	2020	4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (1 Tahun 2 Bulan)
		6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan)
		7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (2 Tahun 6 Bulan)
		3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Penjara Waktu tertentu (1 Bulan) dan Pidana Bersyarat
		8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn	Pidana Pembinaan selama (4 Bulan)
3	2021	1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn	Pidana Pembinaan selama (4 Bulan)

Sumber : Pengadilan Negeri Muara Bulian

Penulis melakukan penelitian lebih dalam terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn. Karena penulis merasa Putusan Pengadilan ini adalah Pidana Penjara Waktu tertentu yaitu 2 Tahun 6 Bulan. Berdasarkan table di atas Putusan pengadilan ini adalah Putusan yang lebih tinggi dari pada beberapa putusan yang lain sehingga penulis tertarik lebih lanjut untuk menganalisis lebih lanjut pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut. Analisis awal yang penulis lakukan terhadap putusan pengadilan negeri ini terhadap kasus tindak pidana anak membujuk anak untuk melakukan persetujuan akan penulis paparkan secara singkat sebagai berikut:

Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn, hakim memutuskan bahwa Anak Burhan Alias Burhanudin Bin Jaman, Umur 17 Tahun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak, yaitu korban atas nama Hotminawati Siregar Binti Rudianto Siregar, umur 14 Tahun, untuk melakukan persetujuan dengannya. Perbuatan Anak Burhan Alias Burhanudin Bin

Jaman telah memenuhi ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya tersebut, maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan menjatuhkan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di Tunas Organik Farm yang berkantor di kompleks Perumahan Lapas Jambi dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menjatuhkan hukum pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di Tunas Organik selama 3 (tiga) Bulan terhadap perkara tindak pidana anak yang membujuk anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh Anak Burhan Alias Burhanudin Bin Jaman, Umur 17 Tahun terhadap korban atas nama Hotminawati Siregar Binti Rudianto Siregar, umur 14 Tahun, jika dibandingkan dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya tindak

pidana anak membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Hasil dari penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul: **“Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan. (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Mbn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap anak dalam putusan pengadilan negeri Muara Bulian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dan penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, maka penulis mendefinisikan judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, “bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumannya”¹¹.

2. Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk terjemahan istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”, disamping istilah

---

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

“Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana¹².

Berikut adalah pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para sarjana:

- 1) Simons: peristiwa pidana itu adalah “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”¹³.
Perumusan peristiwa pidana menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut: a. Perbuatan manusia b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*) c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.
- 2) Van Hamel Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” sependapat dengan Simons, ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”¹⁴.
- 3) Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan

---

¹² E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187.

¹³ *Ibid*, hlm.205.

¹⁴ *Ibid*, hlm 207.

dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum¹⁵.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

4. Persetubuhan

Persetubuhan adalah istilah di dalam ilmu kedokteran. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian “perkosaan”. Istilah mediknya untuk persetubuhan, yaitu : “Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani”¹⁶. Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi:

- a. *Erectio* penis;
- b. *Penetratio* penis kedalam vagina;
- c. *Ejaculatio* dalam vagina¹⁷.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam senggama dengan air mani (*spermatozoa*).

---

¹⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

¹⁶ Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, PT Karya Unipres, Jakarta, 1981, hlm. 113.

¹⁷ Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 201.

Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk kedalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani.

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”¹⁸.

Berdasarkan defenisi di atas, maka yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

E. Landasan Teoretis

1. Pemidanaan

a. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan. Ketiga golongan teori pemidanaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan: Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya

---

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1986, hlm.209.

walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa “hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan”. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas: “pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat”¹⁹. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan²⁰.

2. Teori Tujuan: Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan

---

¹⁹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142.

²⁰*Ibid*

masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”²¹. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut²².

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti.

Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah

---

²¹*Ibid*
²²*Ibid*

hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus.

Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.²³

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan: Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu²⁴. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat. 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

---

²³Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.106-107.

²⁴Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 19.

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana²⁵.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu²⁶.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat²⁷. Menurut Vos berpendapat bahwa "Daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim."²⁸ Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena

---

²⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.162.

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*, hlm.163.

²⁸*Ibid*, hlm.164.

seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

b. Jenis-Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 menentukan sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*²⁹. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*.

Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "I ... Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction"³⁰.

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*.

Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap

---

²⁹Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.131.

³⁰Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm.

kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan³¹.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah bersifat analisis yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan dan mengenali norma-norma hukum serta menganalisis efektifitas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga ditemukan formula hukum positif untuk kemudian di proyeksikan kedalam suatu tataran empiris kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah “pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani”. Pendekatan undang-undang ini bermaksud untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, ataupun pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Untuk memperoleh pemecahan isu hukum yang sedang diteliti³².

---

³¹*Ibid*

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, CV.Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 92.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah “pendekatan konseptual yaitu, penelitian konsep-konsep hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya”. Pendekatan konseptual ini bermaksud sebagai sandaran untuk memecahkan isu hukum yang diteliti, sehingga memudahkan dalam menemukan pengertian konsep hukum, fungsi hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum atau pertentangan norma yang sedang diteliti³³.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Pengumpulan Bahan hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini adalah kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlakunya berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pendukung, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Data yang diperoleh, diseleksi, dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, yaitu penganalisa yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis,

---

³³ *Ibid*, hlm. 93.

melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui penulisan skripsi ini maka akan tergambar dalam sistematika penulisan sebagai berikut: